

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Partisipasi anggaran pada SKPD Kota Gorontalo terletak pada kategori yang baik, namun perlunya pembenahan terkait keterlibatan setiap pegawai yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran dan kemampuan pegawai dalam memberikan usulan dan pendapat dalam penyusunan anggaran tanpa diminta oleh atasan. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis pertama (uji t) ditemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo.
2. Kejelasan sasaran anggaran terletak pada kriteria yang sangat baik, namun masih perlunya perhatian terkait kejelasan biaya yang dikeluarkan untuk setiap program dalam satu bagian atau divisi yang dirasakan oleh responden masih kurang. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis kedua (uji t) ditemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

3. Ketepatan anggaran terletak pada kriteria yang baik, namun masih perlunya perhatian terkait efisiensi dalam pelaksanaan anggaran setiap program oleh suatu instansi. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis ketiga (uji F) ditemukan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan pula dengan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 41,2%, sehingga masih terdapat faktor lain yang cukup besar pengaruhnya terhadap ketepatan anggaran salah satunya yakni komitmen organisasi

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran merupakan proses yang fungsinya sangat krusial. Untuk itu perlunya perhatian yang serius bagi pimpinan Pemerintah Kota Gorontalo dalam penyusunan anggaran yang melibatkan berbagai pihak agar tidak hanya menjadikan pihak tersebut sebagai pegawai dengan partisipasi semu sehingga ketepatan anggaran akan lebih mudah tercapai.
2. Kejelasan sasaran anggaran merupakan ranah yang harusnya mampu menampung aspirasi pembangunan dari berbagai pihak.

Untuk itu pihak pimpinan Pemerintah terus memperhatikan item-item penting dalam penentuan anggaran serta memaksimalkan sistem pengendalian intern agar tidak terjadi lagi temuan-temuan oleh BPK.

3. Perlunya bagi Pemerintah untuk memperketat pengawasan atas setiap mata anggaran yang telah disepakati, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan.
4. Dalam penelitian ini hanya menguji dua dari lima indikator dalam hal karakteristik sistem penganggaran. Untuk itu, pada peneliti selanjutnya dapat meneliti keseluruhan dari indikator dalam hal karakteristik sistem penganggaran.